



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



**REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TAHUN 2015**



**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT 8 JAKARTA PUSAT**

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Tap. MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan agar setiap Unit Kerja Instansi Pemerintah mulai Eselon II ke atas wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (LAKIP). Sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden tersebut telah disusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 yang diperlukan sebagai acuan penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2015 dan memuat beberapa indikator yang diperlukan sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di bidang perhubungan khususnya sub sektor transportasi laut.

Review Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015 ini disusun karena terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tercantum dalam RENSTRA Kementerian Perhubungan dan RENSTRA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2015-2019.

Jakarta,

2015

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

  
**Capt. BOBBY R. MAMAHIT**  
Pembina Utama (IV/e)  
NIP. 19560912 198503 1 002

**REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT  
TAHUN 2015**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi Laut	1) Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Laut	Rasio Kejadian Kecelakaan (Jumlah Kejadian Kecelakaan/ 10.000 Surat Persetujuan Berlayar) 0.9583
		2) Jumlah sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Laut	
		a. Jumlah SBNP	Unit 206
		b. Tingkat keandalan SBNP	% 98
		c. Jumlah Pembangunan GMDSS	Unit 23
		d. Jumlah Pembangunan VTS	Unit 5
		e. Jumlah Pembangunan Kapal Patroli	Unit 75
		f. Jumlah Pembangunan Kapal Kenavigasian	Unit 10
		3) Jumlah Pedoman/Standar Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut	Dokumen 19
2	Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut	4) Jumlah Gangguan Keamanan Pada Pelayanan Jasa Transportasi Laut (pada kapal)	Kejadian/ Tahun 8
		5) Jumlah Kapal yang telah memiliki Sertifikat ISPS ( <i>International Ship And Port Facility Security</i> )	Kapal 1,572
		6) Jumlah Pelabuhan yang telah memiliki Sertifikat ISPS ( <i>International Ship And Port Facility Security</i> )	Lokasi 370
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	7) Prosentase Pencapaian <i>On Time Performance</i> (OTP) Transportasi Laut	
		a. Waktu rata-rata <i>Dwelling Time</i>	Jam 154
		b. Pencapaian <i>Waiting Time</i> (WT)	% 65
		c. Pencapaian <i>Approach Time</i> (AT)	% 65
		d. Pencapaian <i>Efektif Time</i> (ET)	% 52
		8) Jumlah Pedoman Standar Pelayanan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Dokumen 5
4	Meningkatnya Kompetensi SDM Transportasi Laut	9) a. Jumlah SDM Transportasi Laut yang Bersertifikat (Aparatur Teknis)	Orang 3488
		b. Jumlah SDM Fungsional Teknis Tertentu (Marine A dan Marine B)	Orang 793
		c. Jumlah SDM Ahli Ukur Kapal yang telah Dikukuhkan	Orang 407
		d. Jumlah SDM Bidang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal	Orang 360

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
5	Meningkatnya Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	10) Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	86,24
		11) Prosentase Penyerapan Anggaran	% 100
		12) Nilai Barang Milik Negara (BMN)	Rp 37,284,680,161,876
		13) Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp 620,986,332,124
		14) Jumlah Penyederhanaan Perijinan	Jenis Perizinan 4
		15) Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis	Dokumen 5
6	Meningkatnya Penetapan dan Kualitas Regulasi dalam Implementasi Kebijakan bidang Transportasi Laut	16) Jumlah Rancangan dan Peraturan yang Ditetapkan	Peraturan 14
7	Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada Sektor Transportasi	17) Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Juta ton CO2e 0,336
		18) Jumlah Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan pada Sarana Transportasi Laut	Unit 14
		19) Jumlah Prasarana yang telah Menerapkan Konsep Ramah Lingkungan a. <i>Reception Facilities</i> (RF) b. <i>SBNP Solar Cell</i>	Pelabuhan Unit 2 206
8	Meningkatnya Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim	20) Rasio Penanggulangan Tumpahan Minyak yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran	% 100
		21) Jumlah Kegiatan terkait Perlindungan Lingkungan Maritim	Laporan 5
		22) Jumlah Sertifikat terkait Perlindungan Lingkungan Maritim yang diterbitkan	Sertifikat 4,100
9	Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Keterpaduan Sistem Transportasi Multimoda dan Antarmoda untuk Mengurangi <i>Backlog</i> maupun <i>Bottleneck</i> Kapasitas Sarana dan Prasarana	23) Jumlah pengembangan Pelabuhan untuk mendukung tol laut	Pelabuhan 24
		24) Jumlah Pembangunan/ pengembangan Pelabuhan laut non komersial	Pelabuhan 200
		25) Jumlah Rute Angkutan Laut Tetap dan Teratur untuk Kapal Barang dalam rangka mendukung Tol Laut ( <i>Short Sea Shipping</i> )	Rute 5
		26) Peningkatan Kapasitas Sarana Transportasi Laut a. Jumlah Armada Kapal Laut Niaga Nasional yang berumur < 25 tahun b. Jumlah Armada Kapal Laut Perintis	Kapal 7,154
			Kapal 5
		27) Jumlah Lokasi Pengerukan untuk Memenuhi Persyaratan Alur Pelayaran/Kolam Pelabuhan	Lokasi 13
		28) Terselenggaranya Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Laut	Proyek 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
10	Meningkatnya Kontribusi Sektor Transportasi Laut Terhadap Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)	29) Kontribusi sektor transportasi laut terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)	% 0,30
11	Meningkatnya Produksi Angkutan Penumpang dan Barang	30) Jumlah Muatan Angkutan Laut Penumpang	Orang 7,770,590
		31) Jumlah Muatan Angkutan Laut Barang	Ton 1.094.270.571
		32) Pangsa Muatan Angkutan Laut Barang Luar Negeri oleh Pelayaran Nasional	% 11,12
12	Meningkatnya Layanan Transportasi Laut di Perbatasan Negara, Pulau Terluar, dan Wilayah Non Komersial Lainnya	33) Jumlah Rute Angkutan Laut Perintis	Rute 86

Jakarta,

2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

  
Capt. BOBBY R. MAMAHT  
 Pembina Utama (IV/e)  
 NIP. 19560912 198503 1 002